



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan masih mengacu pada Peraturan Kelapa LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Utama pemerintah Kabupaten Sleman. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2011 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	angka rata-rata	75.00
2	Menurunnya konflik di masyarakat	kasus	50
3	Angka melek huruf	%	92.36
4	APK		
	APK SD	%	115.84
	APK SMP	%	115.88
	APK SMA/SMK	%	75.76
5	APM		
	APM SD	%	99.16
	APM SMP	%	81.02
	APM SMA/SMK	%	53.91
6	Angka harapan Hidup	tahun	74.76
7	Angka Kematian bayi	per 1000 penduduk	4.08
8	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	< 2
9	Angka Kematian Ibu	per 100.000	≤ 69,31
10	PDRB per kapita	Dalam ribu Rp	12.70
11	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor primer	%	3.32
12	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor sekunder	%	4.75
13	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor tersier	%	6.16
14	Penduduk bekerja dari angka kerja	%	94.65
15	Tingkat pengangguran terbuka	%	7.19
16	Angka kemiskinan	%	19.00
17	Pertumbuhan penduduk	%	1,69
18	Irigasi kondisi baik	%	73,50
19	Perhubungan kondisi baik	%	74
20	Partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev pembangunan	%	28.40
22	Akses perempuan dan kelompok perempuan dalam penguatan modal	%	21.50

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015



2.2 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015. Sehingga LAKIP Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2011 merupakan pengukuran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman 2011-2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

2.2.1. Visi dan Misi Kabupaten Sleman

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman 2011-2015 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu: **“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir dan batin, berdaya saing dan berkeadilan gender pada tahun 2015”**.



Visi Kabupaten Sleman dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Sleman yang terdiri dari aparatur pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Sleman. Untuk mewujudkan visi masyarakat Kabupaten Sleman, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :

Misi 1 "Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat"; Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam terus menerus menjaga cita-cita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif, efisien, akuntabel, dan penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta berkehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. Dengan tekad untuk menjaga tata pemerintahan yang baik memiliki konsekuensi melibatkan segenap elemen masyarakat dan kalangan swasta untuk menyediakan peluang dan akses bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Langkah utama yang diambil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah membangun birokrasi yang kokoh, birokrasi yang memiliki kapasitas dan kredibilitas tinggi. Birokrasi sebagai salah satu aktor pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga pada gilirannya dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat secara prima.

Misi 2 "Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat"; Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia



yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya.

Misi 3 "Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan"; Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatnya kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan.

Misi 4 "Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan"; Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi dan mendorong peningkatan swadaya masyarakat dalam memelihara dan membangun kualitas sarana dan prasarana publik.

Misi 5 "Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang" Misi ini merupakan peningkatan intensitas perhatian terhadap permasalahan kesenjangan peran perempuan dalam pembangunan. Langkah untuk memberdayakan dan meningkatkan perlindungan serta meningkatkan peran perempuan dilakukan melalui akses di segala bidang : ekonomi, politik, sosial, budaya sehingga perempuan dapat berkiprah di sektor domestik dan sektor publik.



2.2.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategik. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai berikut:

Misi	Tujuan
1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat:	1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah; 2. Meningkatkan pengelolaan pembangunan daerah; 3. Menciptakan keamanan dan ketertiban msyarakat; 4. Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.	1. Meningkatkan kualitas hidup penduduk; 2. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial Meningkatkan pendapatan masyarakat; 3. Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olahraga; 4. Meningkatkan pelestarian budaya.
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan penanggulangan kemiskinan	1. Meningkatkan perekonomian daerah; 2. Meningkatkan daya beli masyarakat.
4. Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan.	1. Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana publik; 2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala bidang.	1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.



2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Sleman Tahun 2011 - 2015 sebanyak 37 sasaran strategis.

2.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2011

Dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa prioritas pembangunan untuk dilaksanakan pada tahun 2011, dalam menjawab isu-isu strategis yang diprediksikan akan berkembang dan mempengaruhi kinerja pembangunan Kabupaten Sleman. Adapun prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;
2. Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan;
3. Menjaga kualitas kesehatan;
4. Peningkatan kualitas pendidikan;
5. Peningkatan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal;
6. Peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
7. Menjaga kualitas sarana prasarana publik, sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
8. Peningkatan keamanan ketertiban dan pengelolaan bencana.



2.4 Target Indikator Kinerja Makro Tahun 2011

Target indikator kinerja makro Kabupaten Sleman tahun 2011 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Sleman Tahun 2011

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Th 2011
1	Pertumbuhan Ekonomi		
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,28
	PDRB atas dasar harga konstan 2000	Rp.Miliar	6.742,59
	PDRB atas dasar harga berlaku	Rp.Miliar	13.496,88
2	Share PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha		
	Pertanian	%	11,87
	Pertambangan dan penggalian	%	0,46
	Industri pengolahan	%	12,63
	Listrik, gas dan air bersih	%	1,31
	Bangunan	%	14,23
	Perdagangan, hotel dan restoran	%	23,64
	Pengangkutan dan komunikasi	%	6,37
	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	%	10,70
	Jasa-jasa	%	18,79
3	Pendapatan Perkapita	Rp	12.170.335
4	Investasi		
	Nilai investasi PMDM	Rp.Miliar	328,3
	Nilai investasi PMA	Rp.Miliar	1.543
	Investasi non PMA/PMDM	Rp.Miliar	2.393,86
	Penyerapan TK investasi PMDN	Orang	9.247
	Penyerapan TK investasi PMA	Orang	6.230
	Penyerapan TK investasi non PMA/PMDN	Orang	233.463
	ICOR		6,58
	Kebutuhan investasi	Rp.Miliar	2.396,66
5	Koperasi		
	Jumlah koperasi	Unit	638
	Koperasi aktif	Unit	503
6	Sosial Budaya		
	Penduduk:		
	- Jumlah penduduk	Orang	1.108.998
	- Laju pertumbuhan penduduk	%	1,69
	Angka kemiskinan	%	19
	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,19
	Angka harapan hidup	Tahun	74,76
	Indeks pembangunan manusia		78,13

Sumber Data : RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015



2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2011

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Sleman tahun 2011 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2011-2015, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2011, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2011 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Kabupaten Sleman Tahun 2011

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya pelayanan masyarakat	1	Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	rata-rata	75.00
2	Terkendalnya stabilitas keamanan dan ketertiban	1	Menurunnya konflik di masyarakat	kasus	50
3	Meningkatnya kerukunan masyarakat	1	Konflik suku, agama, ras dan artar golongan (SARA)	kasus	6
4	Meningkatnya penanggulangan bencana	1	Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	orang	1,990
		2	Regulasi penanggulangan bencana	regulasi	3



No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
5	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka melek huruf	%	92.36
		2	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	10.12
		3	rata-rata APK SD	%	115.84
			rata-rata APK SMP	%	115.88
			rata-rata APK SMA/SMK	%	75.76
		4	rata-rata APM SD	%	99.16
			rata-rata APM SMP	%	81.02
			rata-rata APM SMA/SMK	%	53.91
		5	Kelayakan guru mengajar :		
			SD	%	45.00
			SMP	%	79.00
			SMA/K	%	88.00
		6	Meningkatnya minat baca masyarakat	%	27.00
		7	Prestasi Siswa :		
6	Meningkatnya derajat kesehatan		Akademik	jumlah prestasi	5.00
			Non Akademik	jumlah siswa yang berprestasi	25.00
		1	Angka harapan Hidup	tahun	74.76
		2	Angka Kematian bayi	per 1000 penduduk	4.08
		3	Angka Kematian Balita	per 1.000 KH	< 2
		4	Angka Kematian Ibu	per 100.000	≤ 69,31
		5	Angka Kesembuhan Penderita TB Paru +BTA	%	82.95
		6	Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk	%	55.00
		7	Prevalensi HIV	%	< 0,5
7	Mengendalikan Laju Pertumbuhan penduduk	8	Persentase balita dengan Gizi buruk	%	0.53
		9	Persentase penduduk yang menjadi pesert jaminan pemeliharaan kesehatan	%	49.00
		1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.69
		2	Pasangan Usia Subur Sasaran KB	%	1.45
		3	KB Pria	%	5.36
		4	KB Mandiri	%	58.21



No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
8	Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS	1	Peran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi PMKS	lembaga	71.00
		2	Sumber potensi kesejahteraan sosial		
			- karang taruna	KTD	86.00
			- pekerja sosial masyarakat	Orang	450.00
		3	Cakupan pelayanan sosial :		
			- Wanita rawan sosial ekonomi	%	25.00
			- Balita terlantar	%	15.00
			- Lansia terlantar	%	25.00
9	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	4	Cakupan sistim jaminan dan bantuan sosial	%	70.00
		1	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor primer	%	3.32
		2	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor sekunder	%	4.75
10	Meningkatnya penanaman modal	3	Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sektor tersier	%	6.16
		1	Pertumbuhan nilai penanaman modal	%	4.18
		1	Penduduk bekerja dari angka kerja	%	94.65
11	meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	2	Tingkat pengangguran terbuka	%	7.19
		3	Angka kemiskinan	%	19.00
		4	PDRB per kapita	dalam ribu Rp	1,270.00
12	Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi	1	Kondisi irigasi baik	%	73,50
13	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi	1	Kondisi sarana dan prasarana perhubungan baik	%	74
		2	SKPD melaksanakan E-Gov	%	23
14	Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman	1	Kondisi sarana dan prasarana permukiman baik	%	37
15	Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian	1	Kondisi sarana dan prasarana perekonomian baik	%	10,8
16	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan	1	Kondisi sarana dan prasarana kesehatan baik	%	64
17	Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan	1	Kondisi sarana dan prasarana pemerintahan baik	%	50



No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
18	Menjaga kualitas sumber daya alam	1	Luas lahan kritis	ha	610
		2	Luas lahan rusak akibat penambangan	ha	190
		3	Luas hutan	ha	5950
		4	Alih fungsi lahan pertanian	%	0,30
		5	Tertib pemanfaatan tanah	%	82
		6	Tertib administrasi pertanahan	%	58
19	meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1	Kualitas udara		< NAB
		2	Status mutu air sungai		-11 sd -13
		3	Kualitas tanah		< NAB
		4	Usaha yang memiliki IPAL	%	83.00
		5	Usaha yang memiliki dokumen lingkungan	%	98.90
20	Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya energi	1	Energi terbarukan terbangun	Buah	310
		2	Elektrifikasi	%	94,50
21	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	1	Partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev pembangunan	%	28.40
		2	Akses perempuan dan kelompok perempuan dalam penguatan modal	%	21.50
		3	Penduduk perempuan bekerja dari angkatan kerja	%	43.34

Sumber Data: RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015 dan Penetapan Kinerja Kabupaten Sleman Tahun 2011

2.6 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintah Kabupaten Sleman mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.



Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas pokok dan fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Adapun penjelasan lebih rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelayanan masyarakat

Kebijakan:

- (1) Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah;
- (2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;
- (3) Meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah;
- (4) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- (5) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang pemerintahan umum dengan program:

- (1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah;
- (2) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah;
- (3) Program Pendidikan Kedinasan;
- (4) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- (5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- (6) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
- (7) Program Pengembangan Kualitas Kebijakan Publik.



2. Terkendalinya Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Kebijakan:

Mendukung stabilitas daerah melalui peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban;

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan program :

- (1) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
- (2) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan;
- (3) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- (4) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)

3. Meningkatnya kerukunan masyarakat

Kebijakan:

- (1) Meningkatkan etika dalam kehidupan berbangsa sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila;
- (2) Meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan :

- (1) Program pengembangan wawasan kebangsaan;
- (2) Program pendidikan politik masyarakat;
- (3) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

4. Meningkatnya penanggulangan bencana

Kebijakan:

- (1) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- (2) Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam melalui peran serta masyarakat untuk mengurangi resiko bencana.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dengan Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.



5. Meningkatnya kualitas pendidikan.

Kebijakan :

- (1) Mempertahankan Wajar 9 tahun dan merintis Wajar 12 tahun;
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan;
- (3) Mengembangkan kurikulum yang berwawasan mutu;
- (4) Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan;
- (5) Mewujudkan iklim belajar yang lebih kompetitif berdasar pada potensi akademis dan budi pekerti;
- (6) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- (7) Meningkatkan aksesibilitas layanan PAUD;
- (8) Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan minat baca masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang pendidikan, dengan program utama :

- (1) Program pendidikan anak usia dini.
 - (2) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
 - (3) Program Pendidikan Menengah.
 - (4) Program Peningkatan Pendidikan non formal.
 - (5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - (6) Program Kreativitas siswa dan guru
 - (7) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Program pendidikan anak usia dini.



6. Meningkatnya derajat kesehatan.

Kebijakan:

- (1) Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau;
- (2) meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- (3) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat;
- (4) Optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan puskesmas dan Rumah Sakit;
- (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang kesehatan dengan program utama sebagai berikut :

- (1) Program Obat dan perbekalan kesehatan;
- (2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- (3) Program Pengawasan Obat dan Makanan;
- (4) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
- (5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat .
- (6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat.;
- (7) Program Pengembangan Lingkungan Hidup;
- (8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- (9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
- (10) Program kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
- (11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
- (12) Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan.



7. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Kebijakan :

- (1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
- (2) Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dengan program utama sebagai berikut:

- (1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas;
- (2) Meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana.

8. Meningkatnya pelayanan terhadap PMKS.

Kebijakan:

- (1) Meningkatkan pembinaan PMKS melalui pemberdayaan dan peran aktif masyarakat;

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Sosial dengan program:

- (1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

9. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan:

- (1) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan;
- (2) Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan inovasi petani tanaman pangan, ternak, dan perkebunan;



- (3) Meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.
- (4) Meningkatkan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota;
- (5) Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, akses modal, inovasi produk, kualitas hasil produk, dan pemasaran hasil produk UMKM.
- (6) Meningkatkan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan dan mengoptimalkan sistem pengamanan pangan.
- (7) Meningkatkan daya tarik dan daya saing pariwisata;
- (8) Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata
- (9) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional;
- (10) Meningkatkan perlindungan konsumen;
- (11) Meningkatkan perlindungan terhadap pedagang tradisional;
- (12) Mengembangkan manajemen usaha perdagangan dan pengendalian distribusi
- (13) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam usaha industri;
- (14) Meningkatkan akses permodalan bagi usaha industri mikro dan kecil serta perluasan jaringan pemasaran

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Ketahanan Pangan, bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, bidang Perdagangan, bidang Industri, bidang Pariwisata, Perdagangan dengan program :

- (1) Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- (2) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan;
- (3) Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan;
- (4) Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;



- (5) Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan;
- (6) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- (7) Peningkatan penerapan teknologi peternakan;
- (8) Peningkatan produksi hasil peternakan;
- (9) Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan;
- (10) Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
- (11) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- (12) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
- (13) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
- (14) Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan;
- (15) Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- (16) Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- (17) Pengembangan Kemitraan;
- (18) Meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan;
- (19) Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil-hasil perikanan;
- (20) Pengembangan budidaya perikanan;
- (21) Pengembangan sistem Penyuluhan perikanan;
- (22) Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan;
- (23) Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar;
- (24) Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan;
- (25) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
- (26) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- (27) Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan;
- (28) Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi;
- (29) Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar;
- (30) Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
- (31) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- (32) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
- (33) Pengembangann sentra-sentra industri potensial.



10. Meningkatnya penanaman modal

Kebijakan:

- (1) Meningkatkan minat investasi melalui promosi;
- (2) Optimalisasi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi;
- (3) Meningkatkan jejaring investasi di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang penanaman modal program :

- (1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- (2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- (3) Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.

11. Meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan.

Kebijakan:

- (1) Meningkatkan kesempatan kerja dengan menciptakan dan memperluas lapangan kerja melalui peran serta masyarakat dan swasta;
- (2) Meningkatkan daya saing, perlindungan tenaga kerja dan keserasian hubungan industrial;
- (3) Meningkatkan kemandirian keluarga miskin melalui pemberdayaan.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Tenaga kerja dan bidang Sosial dengan Program:

- (1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- (2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- (3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
- (4) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.

12. Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi

Kebijakan:

Menjaga dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana irigasi air dengan melibatkan peran serta masyarakat;

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang pekerjaan umum dengan Program:



- (1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya;
- (2) Program penyediaan dan pengolahan air baku;
- (3) Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.

13. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi

Kebijakan :

- (1) menjaga dan meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- (2) meningkatkan tertib berlalu lintas untuk mengurangi tingkat kecelakaan.
- (3) Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi bagi seluruh instansi dan masyarakat;
- (4) Mengembangkan e-Gov untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Perhubungan; Komunikasi dan Informatika dengan Program:

- (1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- (2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- (3) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- (4) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
- (5) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;
- (6) Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
- (7) Program kerjasama informasi dan media massa.

14. Meningkatnya sarana dan prasarana permukiman

Kebijakan :

- (1) Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat;
- (2) Meningkatkan upaya rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin;
- (3) Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.



Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Perumahan dengan Program:

- (1) Program Pengembangan Perumahan;
- (2) Program Lingkungan Sehat Perumahan;
- (3) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;

15. Meningkatnya sarana dan prasarana perekonomian

Kebijakan:

Meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Perdagangan dengan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Ekonomi.

16. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan

Kebijakan :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang kesehatan dengan Program:

- (1) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya;
- (2) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
- (3) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;

17. Meningkatnya sarana dan prasarana pemerintahan

Kebijakan:

Meningkatkan prasarana dan sarana pemerintah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Pekerjaan Umum dengan Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah.

18. Menjaga kualitas sumber daya alam

Kebijakan:

- (1) Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat;



- (2) Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat;
- (3) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Lingkungan Hidup dengan Program:

- (1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- (2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- (3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- (5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; dan
- (6) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
- (7) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.

19. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kebijakan:

- (1) Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat;
- (2) Menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat;
- (3) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Lingkungan hidup dengan program:

- (1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- (2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- (3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- (4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- (5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi; dan
- (6) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH);
- (7) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam.



20. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya energi

Kebijakan :

- (1) Meningkatkan pengendalian pemanfaatan sumberdaya mineral dengan peran serta masyarakat;
- (2) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
- (3) Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan;
- (4) Meningkatkan cakupan pelayanan energi.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Program:

- (1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan;
- (2) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan;
- (3) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan;
- (4) Program Pengembangan Energi Terbarukan.

21. Meningkatnya paritipasi perempuan dalam pembangunan

Kebijakan :

- (1) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender;
- (2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan.